

**PROBLEMATIKA DAN PENYELESAIAN
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN
ALASAN EFISIENSI DIKAITKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

TESIS

Oleh:

Sarino

201820251013



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Problematika Pemutusan Hubungan Kerja Dengan
Alasan Efisiensi Dikaitkan Dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Nama Mahasiswa : Sarino

Nomor Pokok Mahasiswa : 201820251013

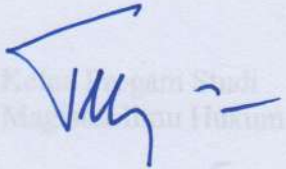
Progam Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum


Bekasi, 20 Juli 2020

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. MS. Tumanggor, S.H., MSi
NIDN 0304065402


Dr. Noviriska, S.H., M.Hum.
NIDN 0325117405

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Problematika dan Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Efisiensi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakeriaan
Nama Mahasiswa : Sarino
Nomor Pokok Mahasiswa : 201820251013
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Tanggal Lulus Ujian Tesis : 20 Juli 2020

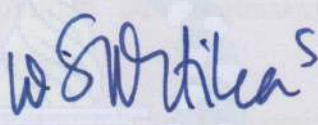
Bekasi : 20 Juli 2020

Mengesahkan

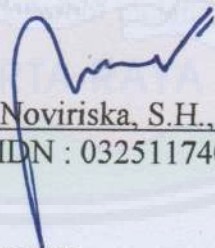
Ketua Tim Penguji


: Dr. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.
NIDN : 0319045403

Penguji I


: Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.M., M.H.
NIDN : 0312117102

Penguji II


: Dr. Noviriska, S.H., M.Hum.
NIDN : 0325117405

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum





Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.
NIDN : 0127117401

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.M., M.H.
NIDN : 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Tesis Yang Berjudul

Problematika dan Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Efisiensi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digunakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 20 Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan



Sarino

NPM : 201820251013

ABSTRAK

SARINO, 201820251013. Problematika dan Penyelesaian pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif didukung penelitian empiris dengan fokus kajian menelaah dan mengkaji Undang-Undang tentang ketenagakerjaan serta pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan hubungan industrial yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 dan beberapa contoh pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan-putusan Pengadilan Hubungan Industrial, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya berupaya memakai istilah lain atau alasan lain seperti memakai istilah dengan mempertimbangkan kepastian hukum dan kemanfaatan serta antara para pekerja dengan pengusaha tidak ada lagi keharmonisan untuk melanjutkan hubungan kerja maka hubungan kerja berakhir sejak putusan dibacakan. Pemutusan hubungan kerja yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja dapat menimbulkan terjadinya perselisihan hubungan industrial khususnya mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja. Atas perselisihan pemutusan hubungan kerja yang terjadi, pekerja dapat menempuh upaya hukum yang dapat dilakukan Pekerja adalah melalui proses mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu : Bipartit, Mediasi/Konsiliasi/Arbitrase, Pengadilan Hubungan Industrial, dan Kasasi ke Mahkamah Agung.

Kata Kunci : Pekerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Mekanisme Perselisihan

ABSTRACT

SARINO, 201820251013. *Problems and Settlement of termination of employment due to efficiency reasons are related to Law No. 13 of 2003 concerning Labor.*

This research is a type of normative legal research supported by empirical research with the focus of studies examining and reviewing the Law on manpower and the consideration of judges in industrial relations court decisions relating to termination of employment for reasons of efficiency in accordance with Article 164 paragraph (3) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. Based on the provisions of Article 164 paragraph (3) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower in conjunction with the Constitutional Court Decision Number 19 / PUU-IX / 2011 and several examples of judicial judicial considerations in the decisions of the Industrial Relations Court, the panel of judges in their legal considerations seeks use other terms or other reasons such as using the term by considering legal certainty and benefits and between workers and employers there is no harmony to continue the employment relationship, the employment relationship ends since the decision is read. Termination of employment that occurred between employers and workers can lead to industrial relations disputes, especially regarding disputes about termination of employment. Upon termination of employment disputes that occur, workers can take legal action that can be done by workers through the process of Industrial Relations Dispute Settlement mechanisms, namely: Bipartit, Mediation/Conciliation/ Arbitration, Industrial Relations Court, and Cassation to the Supreme Court.

Keywords: *Workers, Termination of Employment, Dispute Mechanism*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia yang di anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : Problematika dan Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan Efisiensi Dikaitkan dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan. Adapun tesis ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin dan dalam pembuatan tesis ini, tentunya penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.M., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Dr. MS. Tumanggor, S.H., M.Si selaku Pembimbing Satu (I) Tesis.
4. Dr. Noviriska, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Dua (II) Tesis.
5. Dosen Fakultas Hukum Progran Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh civitas akademika yang telah berperan penting dalam proses pendidikan ini.
6. Rekan-rekan saya, keluarga besar Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan arahan dan masukan untuk penulisan tesis ini.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan tesis ini,

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Bekasi, 20 Juli 2020

Sarino

DAFTAR ISI

COVER LUAR	
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Indetifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4. Kerangka Pemikiran	8
1.5. Kerangka Teori	10
1.6. Metode Penelitian	17
1.7. Sumber Bahan Hukum	18
1.8. Metode Pendekatan	19
1.9. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
1.10. Analisis Data	19
1.11. Keaslian Tesis (Original)	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1. Teori Negara Hukum	22
2.1.1. Konsep Negara Hukum	22
2.1.2. Prinsip Pokok Negara Hukum	26
2.2. Teori Kepastian Hukum	29
2.2.1 Unsur-Unsur Sistem Hukum	31
2.2.1.1 Struktur Hukum (<i>legal structure</i>)	32
2.2.1.2 Substansi Hukum (<i>legal substance</i>)	33
2.2.1.3 Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>)	34
2.2.2 Kemanfaatan Hukum	36

2.3.	Teori Perlindungan Hukum	37
2.3.1.	Teori Keadilan	39
2.3.2.	Teori Ketenagakerjaan	41
2.3.2.1	Hukum Ketenagakerjaan	42
2.3.2.2	Tenaga Kerja	44
2.3.2.3	Hubungan Kerja	45

BAB III PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN EFISIENSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ... 47

3.1.	Batasan Pemutusan Hubungan Kerja	47
3.2.	Pemutusan Hubungan Kerja	50
3.3.	Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Efisiensi	55
3.4.	Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	58
3.4.1.	Penyelesaian Bipartit di Tingkat Perusahaan	58
3.4.2.	Penyelesaian Melalui Mediasi	63
3.4.3.	Penyelesaian Melalui Konsiliasi	68
3.4.4.	Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Efisiensi Melalui Pengadilan Hubungan Industrial	74
3.4.5.	Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia	76

BAB IV ANALISIS KASUS PENERAPAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN EFISIENSI DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 78

4.1.	Penerapan Putusan dan Pertimbangan Hukum Mejlis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Efisiensi	78
4.1.1.	Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung nomor 290/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.BDG	78
4.1.2.	Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung nomor 100/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.BDG.	82

4.1.3. Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung nomor 119/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.BDG.	84
4.1.4. Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.BDG	88
4.2. Tinjauan Penerapan Alasan Efisiensi Dalam Pemutusan Hubungan Kerja.	92
BAB V PENUTUP	95
5.1. Simpulan	95
5.2. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	

